

BAB III

SITUASI PERPOLITIKAN MASA ORDE LAMA (1945-1966)

Pada bab ini akan membahas masa situasi perpolitikan Masa Orde Lama, masa perpolitikan Indonesia, perubahan sistem Pemerintahan, otoritas KNIP dan Demokrasi Liberal. Penulis membandingkan isi dari setiap karya literatur dan mengidentifikasi sudut pandang setiap penulis buku terhadap subjek-subjek yang dibahas nya yang berhubungan dengan skripsi ini. Merujuk pada PPKI Universitas Muhammadiyah Metro

A. Perpolitikan di Indonesia

Sistem Politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian Negara Indonesia, seperti falsafah Negara dan lain sebagainya, dalam banyak hal, walaupun bersifat *transcendental* tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan kiranya perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia, walaupun dipergunakan pendekatan yang menyisihkan pengaruh falsafah sebagai hasil aktivitas merenung-renung.

Kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka pengaruh dari lingkungannya, disamping juga dapat mengubah lingkungannya. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan Orde lama, Orde baru dan bahkan masa pra kemerdekaan, (Abdushshabur, 2004:88).

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amendemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amendemen dan sesudah amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1) Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

2) Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.

- d. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
- e. kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR

1. Perubahan Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa Kemerdekaannya adalah Sistem Presidensil. Sistem Pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undang-undang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. "Menteri merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada presiden". Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementerian. Seharusnya pembentukan kementerian diserahkan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan Departemen dan Susunan Kementerian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Kasman Singodimejo).

Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensil (Kabinet RI 1) dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara. Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerah.

Tetapi perkembangannya karena pengaruh dari golongan sosialis yang ada dalam KNIP maka usia kabinet Presidensil tidak lama yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlemerter dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Sistem Kabinet Parlemerter inilah yang katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini

merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang berdasarkan *multipartai* yaitu sistem pemerintahan parlementer. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP).

Kabinet Parlementer ini terbentuk karena memang sebenarnya direncanakan oleh KNIP. Dimana “kabinet (menteri) bertanggungjawab langsung kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar. Untuk mewujudkan ambisi KNIP tersebut maka mulai dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada 16 Oktober 1945 (Sidang KNIP I). Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang MPR/DPR, disetujui dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X yang ditandatangani wakil presiden. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut maka kekuasaan presiden berkurang yaitu hanya dalam bidang eksekutif saja.

Sementara itu KNIP sebagai badan Legislatif menggantikan MPR dan DPR sebelum terbentuk. Selain kedua hal tersebut KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Usulan tersebut disetujui dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik.

“Adapun partai-partai yang berhasil dibentuk adalah Partai Nasional Indonesia(PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia(PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI), Persatuan Rakyat Marhaen(Permai), Partai Rakyat Sosialis(Paras), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik Republik Indonesia(PKRI).” (Abdushshabur, 2014:90)

Terbentuknya kabinet Syahrir (parlementer I) merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet Prsesidensiil, dimana menteri sebagai pembantu presiden”

sementara itu pelaksanaannya” menteri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada parlemen (KNIP)”. Karena menggunakan sistem parlementer maka kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh parlemen (KNIP).

2. Perubahan Otoritas KNIP

Keragaman ideologi dan partai politik sudah ada pada awal abad ke-20, yakni pada masa pergerakan nasional. Ada yang berideologi nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Pada masa pendudukan Jepang semua organisasi politik dinyatakan bubar. Kemudian, Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Setelah proklamasi, organisasi-organisasi pada masa kolonial Belanda itu berkembang kembali, (Badruzzaman, 2008).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengadakan rapat pleno pertama. Dalam rapat itu, ke-lompok sosialis di dalam KNIP di bawah pimpinan Sutan Syahrir mengusulkan dua hal kepada pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP)
- Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum DPR/MPR hasil pemilu terbentuk.

Wakil Presiden Moh. Hatta yang memimpin sidang menerima usul kelompok sosialis itu dengan mengeluarkan Malumat Wakil Presiden No X. Dengan diterimanya kedua usul dari kelompok sosialis, maka berubahlah otoritas KNIP dan lembaga kepresidenan.

Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya hanya sebagai badan pembantu presiden berubah menjadi pemegang kekuasaan legislatif. Sebaliknya kekuasaan presiden yang sebelumnya sangat luas, kini mulai sangat terbatas (Badruzzaman, 2008:90). Dalam kegiatannya KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usul itu dituangkan dalam Pengumuman BP KNIP No. III tanggal 30 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Ketua BP KNIP Sutan Syahrir. Usul BP KNIP dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Roda pemerintahan telah berputar sehingga BP KNIP merasa telah tiba saatnya untuk mengusahakan pergerakan rakyat.

- Dalam rangka asas demokrasi, BP KNIP tidak sependapat dengan PPKI tentang penetapan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia.

Atas usul BP KNIP tentang dibentuknya partai-partai politik, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. III tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden RI Moh. Hatta. Maklumat berisi anjuran tentang pendirian partai politik untuk menampung segala aliran dan paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah mengharap agar partai-partai politik terbentuk sebelum pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat yang berlangsung pada bulan Januari 1946.

PNI adalah gabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing telah berdiri pada bulan November dan Desember 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah partai politik terus bertambah. Dengan memanfaatkan partai politik yang ada, para politisi berebut kursi dan jabatan dalam pemerintahan, (Badruzzaman, 2008).

BP KNIP bahkan mengusulkan kepada pemerintah agar menteri-menteri tidak lagi harus bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada KNIP sebagai pengganti fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu (perubahan menjadi kabinet parlementer). Usul BP KNIP yang dimotori oleh Sutan Syahrir itu ternyata disetujui oleh pemerintah.

Persetujuan pemerintah itu diumumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Kabinet Presidentil berubah menjadi Kabinet Parlementer sejak bulan November 1945 dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir sehingga kabinet itu disebut Kabinet Syahrir. Perubahan dari Kabinet Presidentil menjadi Kabinet Parlementer merupakan tindakan penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara.

3. Pembentukan Partai Politik

Ide dan gagasan mengenai partai politik di Indonesia sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dalam makna proklamasi. Perdebatan mengenai topic kepartaian terus berlangsung dan memuncak pada awal-awal kemerdekaan. Elit politik Indonesia pada saat itu mulai memikirkan bahwasanya Indonesia menjadi Negara yang Demokratis. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah infrastruktur demokrasi yang diharapkan mampu menyalurkan aspirasi rakyat melalui jalur demokratis. Namun disisi lain pula, beberapa elit politik juga

tidak menghendaki adanya banyak partai politik. Para elit politik berkeinginan adanya sistem partai tunggal yang diharapkan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka, partai politik hanyalah pemecah belah rakyat dan menjadi sandungan bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam angapan pembentukan partai politik di awal kemerdekaan.

Lahirnya sebuah gerakan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, tidak hanya sebagai jawaban atas Partai Nasional Indonesia (PNI), melainkan juga dapat dipahami dalam konteks perdebatan tentang model-model kepartaian yang ada saat itu. Presiden RI pertama misalnya, yang masih memendam hasrat untuk merawat keberadaan sebuah partai pelopor, yang menjadi satu-satunya partai yang ada pada saat itu, (Dzulhadi,2009). Partai yang ada akan lebih membuat Indonesia menjadi lebih kuat dalam mengelola pemerintahan Negara sebagai salah satu bagian dari tugas partai politik.

Secara resmi, pada 27 Agustus 1945, pemerintah mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Pemerintah juga menyebutkan mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi parlemen kenegaraan. Namun, PNI hanya bertahan empat hari. Pada 1 September, partai tersebut dibubarkan karena dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Para elit politik memikirkan pembentukan partai politik yang lain. Maka muncullah “Maklumat Pemerintah 3 November 1945”. Isi dari maklumat tersebut adalah anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka, seperti disebutkan dalam maklumat itu, “memperkuat perjuangan... mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masjarakat.”(Dzulhadi,2009)

Maklumat merupakan sebuah *turning point* untuk proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa, perbedaan pandangan mengenai sistem partai tunggal dan multipartai sama menariknya dengan proses lahirnya partai-partai politik itu sendiri. Maka berawal dari hal tersebutlah dapat dilihat bagaimana pergulatan pemikiran para elit politik pada saat itu, terutama dalam hal bagaimana mereka memaknai demokrasi, (Badruzzaman, 2008).

Berikut partai politik baru setelah dikeluarkannya “Maklumat Pemerintah” sebagai bagian dari proses pembentukan partai politik di awal kemerdekaan

- a) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) – didirikan oleh dr. Sukiman (07 Nopember 1945).
- b) Partai Komunis Indonesia (PKI) – didirikan oleh Moh. Jusuf sejak (Nopember 1945).
- c) Partai Buruh Indonesia (PBI) – dipimpin oleh Nyono – (8 Nopember 1945) yang merupakan contoh partai politik di awal kemerdekaan.
- d) Partai Rakyat Jelata (PRJ) – dipimpin oleh Sutan Dewanis dan (8 Nopember 1945).
- e) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) – dipimpin oleh Ds Probowinoto (10 Nopember 1945).
- f) Partai Sosialis Indonesia (PSI) – dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin (10 Nopember 1945).
- g) Partai Rakyat Sosialis (PRS) – dipimpin oleh Sutan Syahri (20 Nopember 1945).
- h) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) – dipimpin oleh I.J. Kasimo(8 Nopember 1945).
- i) Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) – dipimpin oleh J.B. Assa (Nopember 1945).
- j) Partai Nasional Indonesia (PNI) – dipimpin oleh Didik Joyosukarto (29 Januari 1946).

Itulah sedikit penjelasan terkait pembentukan partai politik pada era awal kemerdekaan Indonesia. Tentu jumlah partai politik pada masa tersebut tetap kalah dengan jumlah partai politik aktif saat ini. Pada dasarnya, sebuah partai politik pemerintahan, diharapkan dapat membantu menyalurkan aspirasi dan suara rakyat pada pemerintah

B. Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering

menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

- 1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
- 2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
- 3) Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
- 4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

1. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh: Muhammad Natsir

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRD. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh: Mr. Ali Sastroamijoyo

Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh: Burhanuddin Harahap

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh: Ali Sastroamijoyo

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, yang mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

2. Latar Belakang Pemilu 1955

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka sejak itu pula Indonesia mengatas namakan diri sebagai negara yang menganut asas demokrasi. Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala harus dilakukan. Tetapi karena berbagai kendala yang dialami oleh negara yang baru merdeka, pemilu tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan melainkan baru dapat terselenggara pada tahun 1955. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia yang sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis.

Pemilu ini diadakan pada saat negara Indonesia masih mengalami kekacauan keamanan yang kurang kondusif, antara lain kekacauan dari pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin Kartosuwiryo. Dalam kondisi demikian, para anggota dari angkatan bersenjata dan polisi masih dipbolehkan ikut memilih, tidak seperti peraturan yang berlaku sekarang. Penggiliran kedatangan ke tempat pemilihan dilakukan untuk mereka yang bertugas di daerah rawan sehingga pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Pemilu pada tahun 1955 sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia karena kekuatan parpol – parpol akan terukur dengan lebih cermat dan menghasilkan parlemen yang lebih bermutu sebagai suatu lembaga perwakilan. Sebelumnya parlemen selalu menjadi sasaran kekecewaan rakyat dan kelompok militer. Selain itu rakyat juga memiliki harapan yang tinggi akan suksesnya pemilu karena berkali – kali jatuh banggunya kabinet, pemerintah yang selalu ditentang oleh tentara, korupsi, nepotisme dan kesan ketidakmampuan pemerintah untuk menghadapi berbagai masalah negara.

Sejarah pemilu 1955 sebenarnya sudah bermula sekitar tiga bulan sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah sudah berniat untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana tercantum dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta tanggal 3 November 1945. Isi maklumat tersebut menyebutkan bahwa pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan MPR akan dilakukan pada Januari 1946. Akan tetapi, pada kenyataannya pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dan tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali kesempatan saja. Penyebab keterlambatan dan pelaksanaan yang tidak sesuai maklumat tersebut terjadi karena kendala dari dalam dan luar negeri

3. Politik Luar Negeri

Secara harfiah, politik Luar negeri memiliki pengertian sebagai suatu taktik atau strategi yang diterapkan oleh suatu negara terkait hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Dalam arti yang lebih luas, definisi politik luar negeri adalah sebagai pola perilaku dari suatu negara dalam menjalin hubungan dengan dunia Internasional.

Menurut sebuah buku yang berjudul “Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (tahun 1984-1988) menyatakan bahwa politik luar negeri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan kebijakan politik luar negeri maka berarti pemerintah telah memproyeksikan berbagai kepentingan nasional terhadap masyarakat antar bangsa. Dengan kata lain, termuat gambaran terkait kondisi suatu negara di masa yang akan datang dalam rumusan tujuan diterapkannya politik luar negeri tersebut, dimana dalam pelaksanaannya diawali dengan adanya penetapan kebijakan serta keputusan dengan bahan pertimbangannya adalah hal-hal yang didasarkan pada faktor nasional sebagai faktor internal, dan faktor-faktor yang berasal dari dunia internasional sebagai faktor eksternal.

a. Landasan hukum

Setiap negara memiliki kebijakan terkait politik luar negeri yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan politik luar negeri sebagai salah satu kebijakan dalam pemerintahan. Dimana yang menjadi landasan atau dasar hukum terkuat bagi kebijakan tersebut adalah

- Alenia I: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
- Alenia IV: dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

C. Buya Hamka dan Tragedi 1965

Tahun 1960-an merupakan salah satu periode buruk dari bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi mengalami inflasi besar-besaran. Situasi politik tidak menentu seiring dengan dibubarkannya Konstituante hasil pemilu dan digantikan oleh orang-orang yang Sukarno tunjuk sendiri. Belum lagi, dibubarkannya partai Masyumi, salah satu peraih besar dalam pemilu 1955. Tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjara tanpa bukti yang kuat. Situasi sosial pun cukup mencekam, karena banyak propaganda dan adu domba.

Di akhir dekade 1950-an, Buya Hamka melepaskan jabatannya dari pegawai Kementerian Agama karena ia tergabung dalam partai Masyumi. Tak lama setelah itu, Masyumi pun dibubarkan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Masyumi menentang ide "Kabinet Empat Kaki" karena dianggap memberi ruang pada Komunisme melalui PKI.

Dalam sebuah sidang Konstituante, dikisahkan, pernah Hamka menginterupsi Sukarno. Ketika Sukarno mempromosikan Kabinet Empat Kaki itu, ia menyebut, "inilah shiraatal mustaqim" (jalan yang lurus). Hamka yang tidak setuju, kemudian menginterupsi, "itu bukan shiraatal mustaqim, tapi shirat ilal jahim" (jalan menuju neraka), karena memberi kesempatan bagi Komunisme untuk berkuasa.

Buya Hamka kemudian mengonsentrasikan hidupnya dalam membangun dan memakmurkan Masjid Al Azhar di Kebayoran. Di tengah situasi nasional yang kurang bersahabat, beliau menyatakan bahwa "selama ini kita lalai memperhatikan masjid karena terlalu sibuk di parlemen, sekarang, kita mulai perjuangan dari masjid".

Komunisme, melalui PKI di tahun-tahun itu mulai merasuki banyak posisi di pemerintahan. Sementara, oposisi terkuatnya, Masyumi, sudah dibubarkan. Di banyak daerah, PKI juga mulai menjalankan ide kesejahteraan ala mereka, dengan merebut banyak lahan dari tuan-tuan tanah. Hal ini memicu terjadinya banyak kerusuhan di daerah.

Di Masjid Al Azhar, Buya Hamka tetap mengupayakan sinar Islam tetap bercahaya. Beliau mendirikan majalah Panji Masyarakat, dan menjadi majalah Islam terpopuler saat itu. Dengan membawa semangat pembaharuan Islam dan semangat keindonesiaan, Panji Masyarakat mendapat tempat di masyarakat. Salah satu nomor paling fenomenalnya ialah ketika memuat tulisan Mohammad

Hatta, yang saat itu sudah mundur dari kursi Wakil Presiden, yang mengkritik kebijakan Presiden Sukarno. Tulisan itu bertajuk "Demokrasi Kita".

Mendapat kritik yang tajam, bahkan dari mantan wakilnya, akhirnya majalah Panji Masyarakat ditutup pemerintah. Tak lama, karena dengan berbagai desakan, akhirnya dimunculkan kembali majalah dari masjid itu. Yakni, *Gema Islam*. Pendirian ini didukung pula oleh unsur tentara, seperti Jenderal Sudirman dan Jenderal A.H. Nasution. Melalui majalah ini, beliau mengkritik pemerintah dalam beberapa hal, terutama dalam keterlibatan komunis, namun di sisi lain juga mendukung pemerintah, seperti dalam kasus Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.

Serangan terhadap Buya Hamka pada tahun-tahun itu banyak datang dari PKI. Salah satu koran terpopuler saat itu yang berafiliasi pada PKI, *Bintang Timur*, menyerang karya Buya Hamka. *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, karya sastra terbesar Buya Hamka, dituduh plagiat. Dalam berbagai edisi, koran itu menuduh cerita dalam *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* menjiplak novel *Magdalena*, karya penulis Mesir Musthafa Luthfi Al Manfaluthi.

Untuk menengahi polemik ini, HB Jassin, pakar sastra terkemuka di saat itu, mengadakan kajian. Hasilnya, novel Buya Hamka bukanlah plagiat. Sekalipun ada kemiripan di beberapa tempat, paling jauh hanya dapat dikatakan "disadur". Sebab, tokoh, latar, maupun banyak jalan cerita, merupakan khas Indonesia. Bahkan, dalam beberapa bagian, merupakan kisah dari kehidupan Buya Hamka sendiri.

Rupanya, polemik itu membuat nama Buya Hamka dijatuhkan dalam kalangan sastrawan. Di tengah kondisi yang sulit, nama Buya Hamka di kalangan "kiri" sudah buruk. Dituduh plagiat, mengkhianati negara, hingga tuduhan yang membawanya pada penjara. Merencanakan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Senin siang, tanggal 23 Januari 1964 atau 12 Ramadhan 1383 H, datang tiga orang polisi dari Departemen Angkatan Kepolisian (Depak) menangkap Buya Hamka. Beliau ditangkap dengan alasan melanggar Penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963. Isi dari Penpres itu membolehkan kepolisian menangkap siapapun yang dicurigai akan melakukan makar.

Buya Hamka dipenjara di berbagai tempat di wilayah Puncak hingga Sukabumi. Beliau diinterogasi (dengan salah satu kejadiannya sudah dikisahkan

di awal) oleh banyak polisi secara bergantian. Pemeriksaan itu cukup menyiksa, dengan kondisi beliau saat itu sudah berusia 56 tahun, hingga tidak tertidur dalam beberapa hari pemeriksaan. Beliau akhirnya bisa istirahat setelah kemudian dipaksa menandatangani sebuah surat pengakuan. Mengakui hal yang tidak pernah ia perbuat sebelumnya.

Beliau juga dijebak dengan berbagai pertanyaan. Termasuk dengan sebuah pernyataan dari seorang sahabatnya, Zawawi, yang ternyata juga membuat sebuah pengakuan palsu karena tidak tahan disiksa. Buya Hamka kemudian mengarang bahwa pernah diadakan sebuah pertemuan untuk merencanakan pembunuhan Presiden Sukarno di Tangerang. Untuk menyukseskan gerakan ini, beliau dituduh mendapat bantuan empat juta dollar dari Perdana Menteri Malaysia. Meski kemudian terbantahkan melalui proses rekonstruksi yang tidak menemukan bukti maupun tempat seperti yang digambarkan.

Fitnah lainnya ialah bahwa Buya Hamka menghasut mahasiswa di IAIN Ciputat (kini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) untuk meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo (DI/TII), Daud Bereuh (Aceh) dan yang lainnya. Rupanya, ada seseorang yang menjadi mata-mata dan berpura-pura menjadi mahasiswa. Dia mendengar hanya setengah, datangnya terlambat, pulanginya lebih awal, ia tidak dengar sampai akhir. Lantas menyimpulkan bahwa Buya Hamka menghasut pemberontakan.

Buya Hamka kemudian ditahan selama kurang lebih dua tahun. Di tengah masa tahanan, penyakit wasir beliau kambuh. Sehingga beliau meneruskan tahanan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta. Rupanya, menurut sebuah kisah, dokter yang merawat beliau di Rumah Sakit Persahabatan merupakan pengagum beliau. Sehingga, beliau terus dinyatakan "sakit" agar tidak harus kembali ke tahanan. Beliau tetap tinggal di rumah sakit dan bisa mendapat perawatan yang lebih manusiawi.

Selama masa tahanan, Buya Hamka diizinkan untuk membawa berbagai buku bacaan. Beliau menghibur diri dengan kisah Ibnu Taimiyah, ulama besar Islam yang pernah mengalami hal serupa. Ditahan oleh rezim yang berkuasa dan mengalami penyiksaan.

Untuk mengisi waktu, beliau melanjutkan proyek penulisan buku Tafsir Al Azhar. Yang di kemudian hari akan menjadi *magnum opus* beliau. Buku tafsir ini

pada akhirnya pun selesai, atau setidaknya hampir selesai, ketika masa tahananannya berakhir. Setelah bebas pada akhir Januari 1966, Buya Hamka kemudian melakukan penyempurnaan dan menerbitkan Tafsir Al Azhar, hingga bagian terakhirnya terbit beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia di tahun 1981.

Setelah bebas dari penjara, kemudian hidup di masa pemerintahan Orde Baru, Buya Hamka rupanya tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang dahulu pernah menuduh dan memenjarakannya. Sebuah kisah menyebut, suatu ketika seorang perempuan datang ke rumah beliau bersama seorang pria, bermaksud untuk belajar Islam.

Rupanya, perempuan tersebut adalah anak dari Pramoedya, sastrawan Lekra yang dahulu menuduh Buya Hamka melakukan plagiat. Dia mau menikahi seorang lelaki mualaf, namun dengan syarat dari bapaknya, "harus belajar Islam kepada Hamka". Akan tetapi, beliau tidak lantas mengusir atau membalas dendam. Beliau tetap mengajarkan perihal agama kepada keduanya dengan ikhlas.

Kepada Presiden Sukarno, yang dalam masa pemerintahannya pernah memenjarakan Buya Hamka, beliau juga tidak menaruh dendam. Di tahun 1970, ketika Sukarno wafat dalam tahanan politik, Buya Hamka menangis dan sedih atas kepergian sang Proklamator. Beliau pun datang untuk menjadi imam shalat jenazah dari Sukarno. Beliau pun berkata di tepi peti matinya, "dengan ikhlas saya berkata, aku maafkan engkau, saudaraku".

D. Pandangan Buya Hamka terhadap Komunisme

Mengenai paham Komunisme, salah satunya, beliau menuliskan pandangannya dalam Tafsir Al Azhar itu. Ketika sedang menafsirkan ayat ke-116 dari surat Al An'aam, yang berbunyi

"Dan, jika engkau ikut kebanyakan orang di bumi ini, niscaya akan mereka sesatkan engkau daripada jalan Allah. Karena, tidak ada yang mereka ikuti kecuali sangka-sangka. Dan, tidaklah ada mereka selain dari berdusta".

Setelah menjelaskan ayat ini dengan keterangan pada zaman Nabi Muhammad Saw., beliau melanjutkannya dengan yang terjadi di masa beliau hidup. Tulis beliau,

Bertambah jauh dari zaman Rasulullah Saw. bertambah banyaklah keluar pendapat-pendapat manusia, berbagai teori dalam hal filsafat, berbagai doktrin tentang susunan masyarakat, tentang susunan filsafat dan kenegaraan. (...). berbagai tafsir tentang pemerintahan-pemerintahan beraja, demokrasi, diktator, dan liberalisme. Berbagai macam teori tentang sosialisme, ajaran Proudhon dan ajaran Bakonin, ajaran Karl Marx. Kalau semuanya ini kita ikuti, jiwa kita akan pecah berderai, hilang pegangan. Disangka diri telah pintar karena terlalu banyak membaca buku, tetapi keberanian dan ketegasan sikap jiwa telah hilang sehingga ilmu bukan lagi menolong melepaskan diri dari kesulitan, melainkan menambah diri tenggelam ke dalam keraguan.

Lanjut beliau,

Seperti halnya dalam gelanggang ilmu pengetahuan, demikian pula teori-teori pemerintahan. Satu waktu orang mencela sistem pemerintahan kaum feodal yang bersengkongkol dengan kaum pendeta, lalu dipuji pemerintahan kaum borjuis. Kaum borjuis mengemukakan teori liberalisme. Dan, dipujikanlah liberalisme sebab pribadi manusia yang selama ini di bawah kungkungan kaum feodal bersengkongkol dengan kaum gereja, sekarang telah bebas. Bebas jiwa dan bebas berusaha sekehendak hati. Tekanan tidak ada lagi. Kemudian dengan kebebasan tersebut, leluaslah orang yang banyak harta bendanya (kapital) menegakkan usaha, terutama karena perkembangan industri. Kian lama yang bebas itu kian kaya-raya, kian besar modalnya, kian banyak buruhnya yang terdiri dari orang-orang lemah. Kian lama buruh-buruh tadi tidak bebas lagi, tidak mengecap liberalisme menurut mestinya. Lalu dikutuk lagi liberalisme tadi dan timbullah teori sosialisme dan keadilan sosial, hidup yang sama rasa dan sama rata. Dan, akhirnya timbul komunisme. Oleh karena itu, datanglah akhir ayat, "dan tidaklah ada mereka selain dari berdusta". Dan, lebih tepat lagi kalau dipakai ungkapan yang lebih tegas, "dan tidaklah ada mereka selain omong kosong". Segala teori yang tidak berdasar atas kepercayaan kepada Allah adalah teori omong kosong, atau kedustaan dan kebohongan yang diatur rapi.

Pandangan lain beliau mengenai komunisme juga dituliskan dalam buku *Keadilan Sosial dalam Islam*. Beliau menulis,

"Kaum komunis mengingkari adanya kekuasaan Allah. Bertuhan dipandang sebagai suatu kebodohan. Mereka menganjurkan

kemerdekaan dan kebebasan, dan juga dari Allah. Oleh karena teori itu melanggar ketentuan Sunnatullah, akhirnya terpaksa juga mereka mengadakan kekuasaan, yaitu kekuasaan diktator manusia. Katanya, diktator akan berhenti ketika kehidupan komunisme telah tercapai”i.

E. Segi Pedagogis

Sistem Politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian Negara Indonesia, seperti falsafah Negara dan lain sebagainya, dalam banyak hal, walaupun bersifat *transcendental* tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan kiranya perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia, walaupun dipergunakan pendekatan yang menyisihkan pengaruh falsafah sebagai hasil aktivitas merenung-renung.

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.